KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

APLIKASI KEBIJAKAN PUBLIK PEMBANGUNAN AGAMA DI INDONESIA

Dr. Hasan Sazali, MA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Yang Diatur Dan Diubah Dari Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 Bahwa: Kutipan Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf **i** untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak **Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).**

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf **c**, huruf **d,** huruf **f,** dan/atau huruf **h** untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak **Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).**

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf **a**, huruf **b**, huruf **e**, dan/atau huruf **g** untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak **Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).**

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah).

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

APLIKASI KEBIJAKAN PUBLIK PEMBANGUNAN AGAMA DI INDONESIA

Dr. Hasan Sazali, MA

CV. Pusdikra Mitra Jaya
Jln. Williem Iskandar Muda No – 2K/22 Medan
Tlpn. (061) 8008-8209 (0813-6169-9291)
Email: cvpusdikramitrajaya@gmail.com

Komunikasi Pembangunan
(Aplikasi Kebijakan Publik Pembangunan Agama Di Indonesia)

Cet. 1. – Medan cv. Pusdikra Mitra Jaya, 2020
VII. 353 hlm, 26 Cm,
Bibiografi, 354
Hak Cipta Pada Penulis Dan Penerbit
Juni 2020

Komunikasi Pembangunan
(Aplikasi Kebijakan Publik Pembangunan Agama Di Indonesia)

Dr. Hasan Sazali, MA

Penata Letak

Muhammad Fadli

Desain

Pusdikra Mitra Jaya Advertising

Diterbitkan Oleh:
CV. Pusdikra Mitra Jaya
Jln. Williem Iskandar Muda No – 2K/22 Medan
Tlpn. (061) 8008 - 8209 (0813-6169-9291)
Email: cvpusdikramitrajaya@gmail.com

Copyright © 2020 - CV. Pusdikra Mitra Jaya

Cetakan Pertama Juni 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang – Undang. Dilarang Mengutip Sebagian Atau Seluruh Atau Seluruh Isi Buku Ini Dengan Cara Apapun, Termasuk Dengan Cara. Penggunaan Mesin Foto Copi, Tanpa Izin Sah Dari Penerbit.

ISBN: 978-623-94174-0-6

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, penulis ucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan rahmatNya. Kepada kedua orang tua, mertua, istri dan anak tercinta yang senantiasa menjadi sumber semangat Penulis dalam berkarya. Kepada guru-guru, terutama pengajar dan pembimbing sewaktu Penulis menempuh pendidikan S3 di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Buku ini merupakan bagian penelitian disertasi yang Penulis tulis pada tahun 2014 – 2016.

Pembangunan agama, merupakan salah satu bentuk layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia. Menindak lanjuti pendekatan teori komunikasi pembagunan yang dikembangkan oleh Servaes penulis menganalisis ada sesuatu kekuatan moral yang dibangunnya. Kekauatan moral tersebut merupakan kekauatan yang berasal dari prinsif normativitas yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Kekuatan moral ini dijadikan basis bagi pemerintah dalam melakukan layanan publik untuk memberikan layanan yang terbaik bagi setiap warga. Sehinga aktor yang terlibat dalam proses pembangunan dapat memposisikan dirinya sebagai pelaku dalam menjalankan proses pembangunan, dan dapat melepaskan dirinya dari kekuatan intervensi yang ada dalam dirinya terlebih persoalan ideologi baik itu agama maupun politik. Sehingga kebijakan yang dirumuskan dalam proses pembangunan merupakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sesuai dengan semangat regulasi. Pendekatan teori ini sangat baik, untuk dijadikan salah satu pendekatan bangunan teori, dalam memperkaya teori-teori yang sudah berkembang dalam diskursus keilmuan komunikasi pembangunan. Dari proses analisis ini, penulis menghubungkan dengan perananan pemerintah dalam merealisasikan komunikasi pembangunan agama. Penulis menawarkan suatu formulasi baru terkait dengan sistem dan

lingkaran yang mustahil, penerima tergantung kepada komunikator, komunikator tergantung kepada penerima.

Dalam teori komunikasi yang lazim, komunikasi diterangkan sebagai proses pengiriman informasi dari pembicara kepada pendengar. Dalam model pengiriman ini informasi itu diperlukan seperti benda. Teori klasik itu menjelaskan proses komunikasi dengan apa yang disebut "*metafor transmisi*". Misalnya, seorang mengirim mawar, yang lain menerimanya utuh. Luhmann menolak metapor transmisi itu. Menurut Luhmann pesan komunikasi tidak akan diterima seutuh mawar karena komunikasi memuat tiga macam seleksi, yakni; infomasi (*information*), penyampaian (*Mitteliung*) dan pemahaman (*Verstehen*). Cara penyampaian dan cara pemahaman atas informasi itu dapat memuat informasi itu berubah. Pemahaman itu sendiri dijelaskan oleh teori sistem bukan sebagai sebuah tindakan intensional suatu subjek melainkan sebagai momen dalam proses komunikasi yang berciri *kontigen*. Karena komunikasi tiga macam seleksi itu, kita akan sampai pada konskuensi mengejutkan. Knodt (1995) dalam Luhmann (1995) menulis, "Kejujuran tidaklah dapat dikomunikasikan karena kejujuran tidak jujur melalui komunikasi". Mengapa begitu? Karena hubungan antara informasi dan penyampaian tidaklah absolut, melainkan kontigen. Saat diubah menjadi informasi, sebuah intensi sudah berubah isi, dan perubahan isi terjadi lagi saat informasi itu disampaikan. Pada akhirnya pemahaman penerima informasi yang bukanlah suatu tindakan intensional, melainkan hanya momen kontigen dalam komunikasi, akan mengubah lagi isinya. Dalam arti ini, sebuah saling pemahaman menurut Luhmann adalah mustahil. Tiap sistem psikis (ego) terpisah dari sistem psikis yang lain (altar ego) dan keduanya lewat komunikasi tidak saling memahami lebih baik daripada sebelumnya karena masing-masing mengamati yang lain sebagai suatu sistem terhadap lingkungannya bahwa

komunikasi terjadi sebagai suatu kontigensi dan bukan suatu fusi sistem-sistem psikis.

Dalam teori sistem kontigensi berarti ketidakniscayaan. Mendidihnya air pada seratus derajat Celcius adalah keniscayaan, namun terjadi atau tidaknya komunikasi tidaklah niscaya, yakni kontigen. Kata kontigensi tidak lain dari pada suatu kompleksitas. Dalam hal ini Luhmann berbicara tentang manusia sebagai "kontigensi ganda" (*doppelte kontigenz*), kompleksitas internal sistem psikisnya dan kompleksitas eksternal sistem sosialnya membuat komunikasi menjadi serba tidak pasti.

Komunikasi ganda seperti itu membuat kita tidak lagi bisa memandang komunikasi sebagai hasil suatu subjek, seolah-olah subjek itu menguasai sepenuhnya apa yang dikatakannya. Menurut Luhmann komunikasi harus dianggap "tanpa subjek". Komunikasi tidak mengacu kepada manusia dan juga tidak kepada keadaan psikisnya, melainkan kepada komunikasi itu sendiri. Dengan kata lain berkomunikasi bukanlah manusia. Komunikasi berkomunikasi dengan komunikasi itu sendiri.

Menurut Luhmann (1995) dalam K.Sitorus (2008) sistem-sistem yang mengorganiasikan dirinya (*self-organization*) untuk menghasilkan dirinya sendiri (*self-production*) dengan merujuk kepada dirinya sendiri (*self-refrential*) sehingga demikan membedakan dirinya dengan lingkungan (*selft-differentiation*) dimungkinkan melalui komunikasi (*communication*). Bagi Luhmann, bukan individu-individu atau tindakan individu, melainkan komunikasi unit sosial yang paling kecil (bila realitas dipahami sebagai teks atau bahasa maka tindakan manusia dianggap sebagai asal usul tatatanan sosial), "sistem-sistem sosial eksis sebagai sistem-sistem komunkasi", katanya. Karena itu, setiap yang sosial harus diidentifikasi sebagai komunikasi. Komunikasi itu adalah mekanisme yang mengkonstitusikan masyarakat sebagai sistem-sistem autopeisis.

Komunikasi dengan demikian merupakan struktur dasar antar masyarakat dan relasi antar keduanya yang bersifat sirkuler. Tidak ada masyarakat tanpa ada komunikasi. Perlu digarisbawahi yang dimaksud dengan komunikasi di sini tidak dipahami pertama-tama sebagai proses yang terjadi antar dua individu yang saling menyampaikan isi pikiran masing-masing, melainkan dalam konteks relasi sistem dengan lingkungan.

Komunikasi kata Luhmann, tidak pertama-tama dimaksudkan untuk menyapaikan informasi, melainkan untuk menciptkan perbedaan dari lingkungan. Dalam komunikasi, sistem melakukan seleksi informasi berdasarkan pemikiran tertentu yang dimilikinya. Seleksi dilakukan dari kemungkinan-kemungkinan tanpa batas yang tersedia. Dalam bahasa teori sistem, seleksi ini sama dengan reduksi kompleksitas. Namun pengertian yang dihasilkan melalui komunikasi juga bersifat temporal, dan ini mendorong sistem untuk terus-menerus berkomunikasi dengan lingkungan. Dengan demikian, komunikasi berarti limitasi (menempatkan diri sendiri dan yang lain di dalam batas-batas). Sebagai kompleksitas, sistem mengandung surplus kemungkinan-kemungkinan yang direduksi secara selektif.

Atas dasar apakah seleksi itu dilakukan, dan apakah yang mengkonstitusikan keseluruhan proses komunikasi tersebut? Itulah makna (*meaning*). Autopoesis itu pada akhirnya ditentukan oleh makna. Keputusan untuk menolak atau menerima informasi tertentu ditentukan atas makna. Makna itulah yang menentukan batas-batas sistem, sehingga ia menjadi sebuah sistem yang berbeda dari sistem-sistem yang lainnya. Setiap sistem mendiferensiasi dirinya dari lingkungan berdasarkan "batas-batas yang dikonstitusikan makna (*meaning-constitud boundaries*)". Setiap pengalaman akan makna adalah juga pengalaman akan perbedaan. Karena itu, makna memiliki "nilai struktural" bagi sistem. Dilihat dalam relasi sistem dengan lingkungan, makna juga bisa didefenisikan sebagai "kompleksitas yang ditemporalisasi", bukan yang

diorganisasikan. Artinya makna itu tidak pernah stabil, ia temporal, selalu berubah sejalan dengan proses komunikasi atau autopoeisis yang bersifat rekursif.

Sesuai dengan konsep kontigensi ganda serta surplus kemungkinan-kemungkinan yang dimiliki sistem, makna kemudian dapat dipahami sebagai "*horison*" kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Setiap makna selalu merujuk ke makna yang lain. Horison terakhir dari keseluruhan makna disebut dunia (*world*). Tentu dunia di sini tidak dalam arti fisik-spesial, melainkan fenomenologis. Dunia, kata Luhmann dengan mengikuti konsep dunia fenomenologis Husserl, lebih dari sekedar jumlah dari semua kemungkinan-kemungkinan atau rujukan bermakna (*meaningful refrences*).

Teori ini akan dapat menganalisis lebih dalam persoalan yang berhubungan dengan sistem, apalagi sistem ini sudah memiliki muatan "*status quo*" dalam sistem sosial masyarakat. Termasuk bagaimana pemaknaan simbol-simbol agama yang dipahami oleh kepala daerah dan pemangku kepentingan sehingga membentuk suatu perilaku dalam melakukan proses penguatan toleransi agama,. Hal ini dapat terukur dengan tingkat intensitas komunikasi yang dilakukan apakah memilki muatan "*inform"* atau "*not to inform"* yang selama ini proses komunikasi yang dilakukan oleh kepala daerah dan pemangku kepentingan terkesan "*monologis*" tidak "*dialogis*". Begitu juga dengan sikap masyarakat yang terbentuk dari respon terhadap perilaku yang dimunculkan oleh kepala darah dan pemangku kepentingan. Peroses tersebut juga kemungkinan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga sistem-sistem yang ada dalam sistem sosial keberagamaan masyarakat baik sistem tersebut terbentuk dari atas dorongan kekuatan masyarakat atau bentukkan yang diciptakan oleh kepala daerah. Dalam hal ini kekuatan pemerintah selaku pembuat regulasi.

B. Komunikasi Pembangunan

Quebral (2006) dalam Srampickal (2006: 2,3) menyatakan istilah komunikasi pembangunan pertama kali diperkenalkan di Filipina pada tahun 1970 oleh Nora Quebral, dengan memberikan defenisi komunikasi pembangunan adalah seni dan ilmu mengenai komunikasi manusia yang digunakan untuk mempercepat perubahan di suatu wilayah dan mengubah orang dari kemiskinan kepada kesetaraan ekonomi yang dinamis yang membuat penduduk bisa mencapai keadilan sosial dan memenuhi kebutuhan potensi manusia.

Harun dan Ardianto (2011: 2) menyatakan bahwa komunikasi pembangunan merupakan disiplin ilmu dan pratikum komunikasi dalam konteks negara-negara yang sedang berkembang, terutama kegiatan komunikasi untuk perubahan sosial yang berencana. Komunikasi pembangunan dimaksudkan untuk secara sadar meningkatkan pembangunan manusiawi. Itu berarti komunikasi berperan sebagai salah satu pendekatan dari beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk menghapuskan kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan. Komunkasi pembangunan yang diutamakan adalah kegiatan mendidik dan memotivasi masyarkat, bukannya memberikan laporan yang tidak realistis dari fakta-fakta atau sekedar penonjolan diri. Tujuan komunikasi pembangunan adalah untuk menanamkan gagasan-gagasan, sikap, mental, dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu negara berkembang. Secara pragmatis, dapatlah dirumuskan bahwa komunikasi pembangunan adalah komunkasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara. Komunikasi pembangunan dalam arti sempit merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memperkarsai dan ditujukan kepada masyarakat luas.

Harun dan Ardianto (2011: 33) menjelaskan bahwa tujuan komunikasi pembangunan adalah untuk memajukan

pembangunan. Pembangunan memerlukan agar rakyat yang mempunyai kadar hidup serta pendapatan sosio-ekonomi yang rendah, harus diberitahu mengenai ide dan kemahiran yang belum mereka kenal kemudian dalam jangka waktu yang singkat, mereka juga diberi motivasi.

Komunikasi pembangunan bersifat timbal balik mementingkan adanya dialog antar kedua belah pihak yang memberikan penerangan atau yang menyampaikan pesan dengan pihak yang menerima pesan. Fungsi apa sajakah yang seharusnya dilaksanakan oleh komunikasi pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan? Hedebro (1979) dalam Harun dan Ardianto (2011: 167), menjelaskan, ada tiga identifikasi komunikasi dan pembangunan yang berkaitan dengan tingkat analisisnya, yaitu:

1. Pendekatan yang berfokus pada pembangunan suatu bangsa, dan bagaimana media komunikasi dapat memberikan sumbangan dalam proses pembangunan tersebut. Di sini politik dan fungsi-fungsi media massa dalam pengertian yang umum merupakan objek studi, sekaligus merupakan masalah-masalah yang menyangkut struktur dan organisasional dan pemilikkan, serta kontrol terhadap media.
2. Peranan media massa dalam pembangunan nasional, namun jauh lebih spesifik. Menurut pendekatan ini, media lebih sebagai pendidik atau guru, dan idenya adalah bagaimana media massa dapat dimanfaatkan untuk mengajarkan kepada masyarakat bermacam keterampilan, dan dalam kondisi tertentu mempengaruhi sikap mental dan perilaku mereka.
3. Pendekatan yang berorientasi kepada perubahan yang terjadi pada setiap komunitas lokal atau desa. Konsentrasinya adalah memperkenalkan ide-ide baru, produk dan cara baru, serta penyebarannya di suatu desa atau wilayah”

Komunikasi pembangunan memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan. Hal ini disebabkan pembangunan memiliki konsep yang mencakup multi aspek dan multi dimensi yang dapat diartikan berbeda oleh setiap orang, proses partisipasi masyarakat secara luas terhadap perubahan dalam pembangunan memiliki arti yang sangat penting dalam proses komunikasi pembangunan.

Inagaki (2007: 1) menyatakan terkadang komunikasi pembangunan selalu diterapkan dalam bentuk yang terlalu umum, hanya memberikan makna proses penyampaian pesan pembangunan tidak sampai kepada issu strategis pembagunan. Model komunikasi pembangunan pada awalnya hanya dilakukan dengan cara satu arah, yaitu model komunikasi yang dilakukan memprioritaskan pendekatan *top-down*. Pertumbuhan media yang pesat dipengaruhi oleh usaha pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negera sehingga pemerintah melakukan bentuk intervensi terhadap bentuk komunikasi pembangunan yang dilakukan.

Dari pemahaman mengenai komunikasi pembangunan di atas, maka dalam proses komunikasi pembangunan agama merupakan salah hal yang penting untuk merumuskan pengertian komunikasi pembangunan agama serta melihat bagaimana proses komunikasi pembangunan agama sehingga isu-isu pembangunan agama yang terkait dengan regulasi toleransi agama dapat diterapkan dengan baik. Fenomena intoleransi dapat dijadikan permasalahan yang penting untuk dicarikan solusinya di dalam pembangunan nasional.

Dalam melakukan suatu proses pembangunan ada beberapa yang harus diperhatikan oleh aktor pembangunan, di antaranya; bentuk negara, kondisi demografi dan keadaan sosio kultural. Hal ini memiliki arti penting bagi aktor pembangunan dalam menyusun proses pembangunan agar pembangunan yang dilakukan benar-benar dapat memberikan perubahan positif dalam kehidupan masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Gudykunst dan Mody (2001: 437). Kondisi

ini juga berlaku untuk aktor-aktor pembangunan yang terlibat di daerah, apalagi untuk menyikapi semangat otonomi yang sudah sekian tahun berjalan di Indonesia.,

Salah satu pendekatan dalam penyampaian pesan pembangunan adalah melalui proses kampanye pembangunan. Kampanye pembangunan yang dilakukan di media massa oleh pemerintah dengan pendekatan komunikasi kontemporer yang paling popular dalam media massa menggunakan berbagai saluran massa yang ada. Hal ini terlihat bahwa media modern mengalami perkembangan yang cukup pesat di hampir semua negara berkembang. Pertumbuhan media massa yang pesat tersebut antara lain turut dipengaruhi oleh pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan.

Para kritikus modernisasi sejak 1970-an telah mengusulkan berbagai perkembangan baru termasuk keterlibatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi dapat diproyekkan dalam pembangunan. Partisipasi juga harus dikenali sebagai hak dasar manusia yang seharusnya diterima dan didukung. Kebutuhan akan berfikir, mengekspresikan diri sendiri, memiliki kelompok, diakui sebagai individu, serta dihargai dan dihormati adalah hal penentu yang secara subtansi memiliki pengaruh atas kehidupan seseorang. Partisipasi sebagai sebuah proses pemberian kuasa kepada masyarakat sehingga mereka diberikan wewenang agar dapat mengatur dan berpendapat demi pembangunannya sendiri. Inagaki (2007: 8) menjelaskan, partisipasi yang melibatkan terhadap warga masyarakat dalam proses pembangunan yang dilakukan, diusulkan oleh Uphoff kepada empat bentuk :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan.
3. Partisipasi dalam evaluasi.
4. Partisipasi dalam menerima manfaat.

Komunikasi interpersonal dalam proses komunikasi pembangunan sering di evaluasi, apalagi ketika model ini diterapkan dalam pendekatan teori difusi inovasi yang terkesan memaksakan terhadap objek komunikasi sehingga pemakasaan ide, dengan menafikan potensi individu terhadap menganalisis isi pesan komunikasi. Hal ini berbeda dengan pendekatan partisipasi, walaupun sama-sama menggunakan komunikasi interpersonal dalam proses komunikasi pembangunan. Namun komunikasi ini masih mempertimbangkan faktor-faktor yang melekat dalam dalam diri individu maupun masyarakat sehingga pesan komunikasi pembangunan dapat tersampaikan dengan baik.

Srampickal (2006: 6) menyatakan salah satu pendekatan yang terbaru dalam tren riset komunikasi pembangunan, yaitu dengan melibatkan pendekatan proses partisipatif dalam komunikasi pembangunan. Komunikasi Pembangunan dan Partisipatif adalah sebuah konsep yang dikembangkan untuk menjawab tantangan perkembangan zaman dalam tren pembangunan yang dimotori oleh negara-negara donor (negara dunia pertama) yang dipelopori oleh Amerika serikat dengan membawa misi moderenisasi. Namun yang harus kita pahami bahwa proses komunikasi merupakan suatu proses yang berkembang karena komunikasi pembangunan mencoba menjawab suatu dinamika perkembangan masyarakat. Berbagai model dan pendekatan baru selalu diperkenalkan supaya roh dari komunikasi pembangunan sebagai sebuah upaya mengentaskan keterbelakangan menuju kehidupan madani dapat terwujud. Perlu juga dipahami bahwa pembangunan ataupun komunikasi pembangunan adalah sebuah usaha yang tidak akan berkesudahan. Ia selalu berkesinambungan karena masyarakat akan selalu dinamis dalam perkembangannya.

Pada perkembangannya pemikiran mengenai komunikasi sebagai sebuah proses untuk membentuk kesadaran melalui bermacam media digunakan atau dipakai dalam prosesnya.

Namun faktanya media massa memiliki keterbatasan. Salah satunya media massa dikuasai oleh golongan menengah ke atas yang umumnya lebih mengutamakan kapitalisasi dan mengejar keuntungan daripada mengembangkan media untuk mendukung pembangunan. Wilkins (2000) dalam Srampickal (2006: 10) mengkritik dengan cukup keras komersialisasi media massa. Di bidang komunikasi pembangunan, sekarang kita menghadapi saat yang kritis, kita membanjiri dengan penilaian antusias pergeseran era kita dari era industri ke era informasi, di mana pengetahuan global lebih diprioritaskan untuk pembangunan nasional. Akan tetapi, masalah serius seperti kemiskinan, kekurangan gizi, kelebihan penduduk, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan tetap menjadi masalah penting di dalam pembangunan.

Seseorang berhak dalam masyarakat memiliki nilai tawar dalam pemberdayaan melalui komunikasi sebagai tanggung jawab sosial dan pelayanan kepada masyarakat sendiri. Hal ini diperlukan karena sejarah teori pembangunan menunjukkan bahwa paradigma seperti modernisasi telah menyebabkan negara yang kuat dan aliansi yang disukai satu paket dengan menyampingkan kepentingan kelompok lain.

Ada tiga bentuk hak asasi dalam proses komunikasi pembangunan menurut Srampickal (2006 : 6):

1. Hak untuk komunikasi / ekspresi adalah hak dasar manusia yang merujuk pada kebutuhan dasar setiap manusia untuk mengekspresikan apa yang ia pikir tentang hal apapun. Selanjutnya terdapat hak atas informasi. Para warga negara memiliki hak untuk mengetahui segala sesuatu yang mempengaruhi mereka di bidang sosial, politik, budaya, dan ekonomi, termasuk rencana negara untuk pembangunan .
2. Demokratisasi komunikasi. Rakyat diberi hak untuk komunikasi. Demokratisasi komunikasi menuntut bahwa setiap warga negara memiliki akses ke media dan terlibat

dalam proses komunikasi dari perencanaan sampai ke tahap evaluasi .

3. Sistem Pengetahuan Adat. Salah satu penemuan besar bagi para peneliti AS di negara-negara dunia ketiga adalah bahwa masyarakat setempat memiliki basis pengetahuan mereka sendiri dan ini bisa menjadi agen perubahan yang kuat jika benar dimanfaatkan.

Buku ini membahas teori komunikasi pembangunan yang dikembangkan oleh Servaes sebagai basis teori yang digunakan untuk melakukan analisis. Jan Servaes, seorang Akademik Eropa. Ia memberikan pandangan yang komprehensif dari hampir semua masalah dalam komunikasi pembangunan yang harus dipertimbangkan pada berbagai tingkat analisis, dari lokal sampai internasional. Ia juga mengintegrasikan sebagian besar pemikiran dan kontribusi besar selama 30 tahun terakhir. Servaes dalam Srampickal (2006) berpendapat bahwa inisiatif untuk membangun harus dimulai dengan masyarakat dan organisasi akar rumput. Ia memberikan penjelasan secara luas, terkait dengan pelaksanaan program-program pembangunan yang dikomunikasikan melalui proses komunikasi pembangunan.

Servaes merupakan salah satu ahli komunikasi pembangunan yang banyak dijadikan rujukan oleh sajana-sarjana komunikasi pembangunan pada saat ini. Ia dilahirkan di Belgia, ia menempuh masa studinya semua di selesaikan di Louvain. Menyelesaikan pendidikan program doktornya di Universitas Katolik Louvain pada tahun 1987. Setelah menyelesaikan pendidikan doktornya ia mulai mengajar di kampus-kampus yang ada di Amerika. Tahun 1988-1994 menjabat sebagai profesor pada bidang komunikasi internasonal dan kebijakan publik di Universitas Katolik Nijmegen Belanda. Selain itu, juga menjabat sebagai profesor komunikasi pembangunan pada dunia ketiga di Universitas of Antwerp dari tahun 1992-1997. Menjabat sebagai Dekan Fakultas Politik dan Ilmu Sosial di Universitas Katolik Brussels

bersumber dari budaya dan kekuatan kearifan lokal merupakan nilai yang kuat untuk dijadikan sebagai strategi komunikasi pembangunan. Kondisi ini tergantung bagaimana pemerintah dan aktor yang terlibat dalam proses komunikasi pembangunan mampu mengoptimalkan dengan baik apa yang didapatkan dari nilai-nilai tardisonal dan budaya dalam menunjang strategi komunikasi pembangunan. Menghadirkan nilai-nilai tradisional dalam konteks kekinian membutuhkan suatu kreativitas yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam bentuk revitalisasi sehingga semangat nilai-nilai tradisi dan budaya dapat terjaga kelestariannya di tengah-tengah arus modernitas. Wang dan Dissanayake dalam Melkote (1991: 94) menetapkan bahwa budaya tidak hanya penting dalam konteks pembangunan dan perubahan sosial, tetapi juga dalam mempertahankan budaya tertentu. Menurut Harun dan Ardianto (2011: 228) menolak peran budaya justru akan menolak munculnya perubahan sosial yang berarti menolak keterlibatan orang-orang dalam prespektif sejarah.

Pada saat ini, muncul sebuah paradigma pembangunan yang baru yang bersifat *open-ended* dan fleksibel ketimbang model-model yang bersifat menekan pada prespektif pada tahun 50-an dan 60-an. Di antara hal lainnya, paradigma baru perlu mengonsep ulang peranan budaya dalam perubahan. Budaya-budaya lokal di bangsa-bangsa yang sedang berkembang yang cukup bertentangan dengan ide-ide mendalam dari para pelaku modernisasi tidaklah bersifat statis. Fakta menunjukkan bahwa mereka bertahan selama berabad-abad pertentangan aturan di bawah rezim penjajahan merupakan sebuah ukuran akan kedinamisan alami mereka, seperti yang dinyatakan oleh Harun dan Ardianto (2011: 228).

Komunikasi pembangunan agama merupakan bagian dari disiplin ilmu dan aplikasi komunikasi dalam konteks pembangunan pada sebuah negara. Komunikasi pembangunan agama tidak hanya berlaku untuk negara-negara berkembang sebagaimana kajian komunikasi pembangunan pada bidang

pertanian dan kesehatan yang banyak diterapkan di negara-negara berkembang dalam rangka membebaskan dari persoalan kemiskinan, komunikasi pembangunan agama juga dapat diterapkan pada negara-negara maju yang menjadikan persoalan agama sebagai suatu aspek yang diurusi oleh pemerintah. Hal ini disebabkan ada suatu hubungan yang kuat antara pembangunan dengan stabilitas kehidupan keberagamaan suatu masyarakat. Pembangunan agama merupakan modal dasar dalam melakukan proses pembangunan pada bidang-bidang lainnya. Komunikasi pembangunan agama merupakan suatu pengembangan keilmuan komunikasi pembangunan dalam menjawab tantangan kehidupan keberagamaan saat ini. Interdesipliner keilmuan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan epistemologis dalam menawarkan konsep keilmuan yang dapat dikaji lebih mendalam terutama tawaran dalam tataran aksiologi konsep keilmuannya. Dalam kasus-kasus penyelesaian konflik komunikasi pembangunan agama dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam memberikan solusi.

Servaes (2007 : 23) menyebutkan bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat internasional saat ini dalam melakukan pembangunan di antaranya : konflik sipil termasuk konflik agama, perubahan iklim, penyakit menular, kelaparan dan kekurangan gizi, pendidikan, dan lain sebagainya. Penguatan toleransi agama dalam komunikasi pembangunan merupakan suatu upaya untuk memberikan salah satu solusi dalam menimalisir kemungkinan munculnya konflik yang bernuasa agama seperti yang terjadi beberapa tahun belakangan ini di beberapa wilayah di Indonesia. Persoalan konflik agama menjadi suatu ancaman yang serius dalam melakukan pembangunan bagi sebuah negara karena ia dapat menghambat berbagai sektor pembangunan lainnya.

Adhikarya (1997: 22) dalam Servaes (2007: 26) menjelaskan, setidaknya ada dua masalah utama yang

membatasi komunikator pembangunan dalam memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan. Masalah pertama adalah berkaitan dengan proses pengkomunikasian terhadap konten pembangunan. Dalam hal ini pemilihan media yang tepat dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi pembangunan, menentukan perencanaan yang baik, dan menerapkan strategi yang tepat. Biasanya aspek ini terkadang tidak menjadi perhatian yang serius bagi aktor yang melakukan proses komunikasi pembangunan. Masalah kedua, kurangnya analisis yang mendalam dengan mempertimbangkan berbagai pendekatan yang ada sehingga pendekatan yang dilakukan dalam melakukan proses komunikasi pembangunan dapat diterapkan secara holistik dengan mengedepankan berbagai pertimbangan. Proses komunikasi pembangunan secara tidak langsung telah melibatkan berbagai pihak dengan menghasilkan suatu pemahaman yang sama antara aktor-aktor yang terlibat dalam proses komunikasi pembangunan dengan masyarakat. Kondisi ini pada akhirnya mampu meningkatkan peran partisipasi masyarakat untuk lebih ikut berperan aktif dalam proses pembangunan.

Pardip Thomas dalam kata pengantarnya di buku Servaes (2007 :36) menjadikan pengakkan unsur hak asasi manusia menjadi bagian yang terpenting dalam melakukan komunikasi pembangunan. Pembangunan yang dilakukan memiliki semangat perlindungan setiap individu. Selama ini pembangunan yang dilakukan terkesan mengabaikan hak-hak individu. Pembangunan agama pada sektor toleransi agama harus mengedepankan hak-hak setiap individu yang telah dilindungi oleh negara dengan memberikan jaminan bagi setiap warga negara dalam menjalani keyakinan agama sesuai dengan yang dianutnya.

Sebagaimana sudah banyak disinggung dalam pembahasan mengenai isu pembangunan, orientasi dari strategi komunikasi pembangunan agama adalah perwujudan hak-hak asasi manusia. Perwujudan kesejahteraan tidak hanya

pada peningkatan pendapatan perekonomian, kehidupan yang layak, dan jaminan kesehatan setiap warga, tetapi juga pengakuan hak-hak keberagamaan setiap individu oleh aktor yang melakukan proses komunikasi pembangunan juga merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan. Hal yang menjadi landasan filosofis dalam komunikasi pembangunan agama adalah prinsip bahwa setiap orang berhak hidup sesuai dengan keyakinan agamanya. Oleh sebab itu, dapat dipahami apabila kelompok sasaran yang memperoleh prioritas bagi startegi ini adalah warga masyarakat dan pemerintah yang masih belum mampu mewujudkan kehidupan tatanan yang harmoni dalam sistem kehidupan sosialnya.

Secara normatif, kewajiban untuk melakukan berbagai upaya terutama oleh negara atau pemerintah dan sebetulnya juga lembaga non-pemerintah untuk mewujudkan kehidupan toleransi agama yang harmoni terutama perlindungan kepada warga yang mendapat perlakuan intoleransi sehingga pemenuhan hak-hak dasarnya secara beragama dalam menjalani keyakinannya dapat terwujud dengan baik.

Pendekatan komunikasi pembangunan menjadi suatu hal yang penting untuk diterapkan dalam sebuah proses pembangunan. Untuk menganalisis isu pembangunan secara lebih komprehensif, dapat dengan melihat dari berbagai macam prsepektif, dapat dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi beserta berbagai macam pendekatan media yang ada, dan dapat menjadikan pembangunan memiliki kekuatan dalam tatanan sistem sosial masyarakat. Semuanya dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembangunan dalam rangka memberikan layanan yang terbaik kepada publik.

Komunikasi pembagunan memberikan suatu tawaran dalam melakukan rekayasa pada perubahan sosial. Perubahan yang ditawarkan adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Konsep-konsep pembangunan terbaru yang sedang berkembang adalah dengan menghidupkan kembali semangat-

semangat kekuatan nilai-nilai tradisional sebagai fasilitator pembangunan. Penyatuan nilai-nilai tradisional dengan sesuatu yang bernuansa modern serta melibatkan masyarakat di tingkat akar rumput secara aktif dalam program pembagunan, menjadi sesuatu kekuatan tersendiri dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut. Harun dan Ardianto (2011: 234) melihat bahwa kesadaran unsur-unsur tradisional dari masyarakat saat ini sekarang telah memasuki saluran-saluran komunikasi yang dapat menjadi sarana serta media dalam proses pengkomunikasian program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah dapat lebih difokuskan pada penguatan toleransi agama komunikasi pembangunan agama oleh kepala daerah dan pemangku kepentingan. Permasalahan lemahnya toleransi agama selama ini belum dapat teratasi secara komprehensif. Hal ini diperlihatkan dengan tingginya angka-angka intoleransi yang terjadi di Indonesia, baik antar pemeluk agama maupun inter pemeluk agama. Permasalahan kebebasan di Indonesia pun tidak hanya disoroti dari beberapa kasus intoleransi di berbagai daerah. Dinilai secara akademis dengan standar penilaian yang sistematis dan terukur, Indonesia juga diindikasikan mempunyai permasalahan dalam kebebasan beragama.

Pemerintah sebagai pemegang kendali kepemimpinan nasional telah memberikan sejumlah aturan perundangan yang apabila ditaati oleh masyarakat, akan menjadi sarana pemersatu bangsa yang kaya akan perbedaan ini. Akan tetapi pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam menciptakan dan menjaga kerukunan ini, mengingat hal ini banyak menyangkut masalah keyakinan dan prinsip-prinsip yang dianut masyarakat. Tokoh agama, FKUB, penyuluh agama, pihak

Kementerian Agama, menjadi bagian yang terlibat secara langsung dalam proses penguatan toleransi agama baik secara struktural maupun kultural.

Penguatan toleransi agama adalah salah satu solusi dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kasus-kasus intoleransi yang dapat menimbulkan konflik yang bernuansa agama. Regulasi yang dibangun oleh pemerintah sebagai dasar ketika melakukan penguatan toleransi agama, di dalam proses pengkomunikasiannya, dengan mempertimbangkan sistem sosial keberagamaan masyarakat, serta faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh dalam melakukan penguatan toleransi agama pada aspek pengkomunikasian pada konten regulasinya.

Untuk memahami kekuatan komunikasi pembangunan agama, perlu dilakukan analisis dalam pendekatan tingkat keterlibatan partisipasi masyarakat, optimalisasi nilai-nilai etnisitas, dan pengakuan hak-hak dasar nilai-nilai keberagamaan setiap individu oleh pemerintah ataupun aktor yang terlibat dalam proses penguatan toleransi agama. Interaksi para aktor yang terlibat dalam proses pengkomunikasian konten regulasi toleransi agama juga menjadikan modal sosial sebagai suatu pendekatan dalam sistem sosial keberagamaan masyarakat yang dijadikan sebagai pendekatan analisis. Secara singkat kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

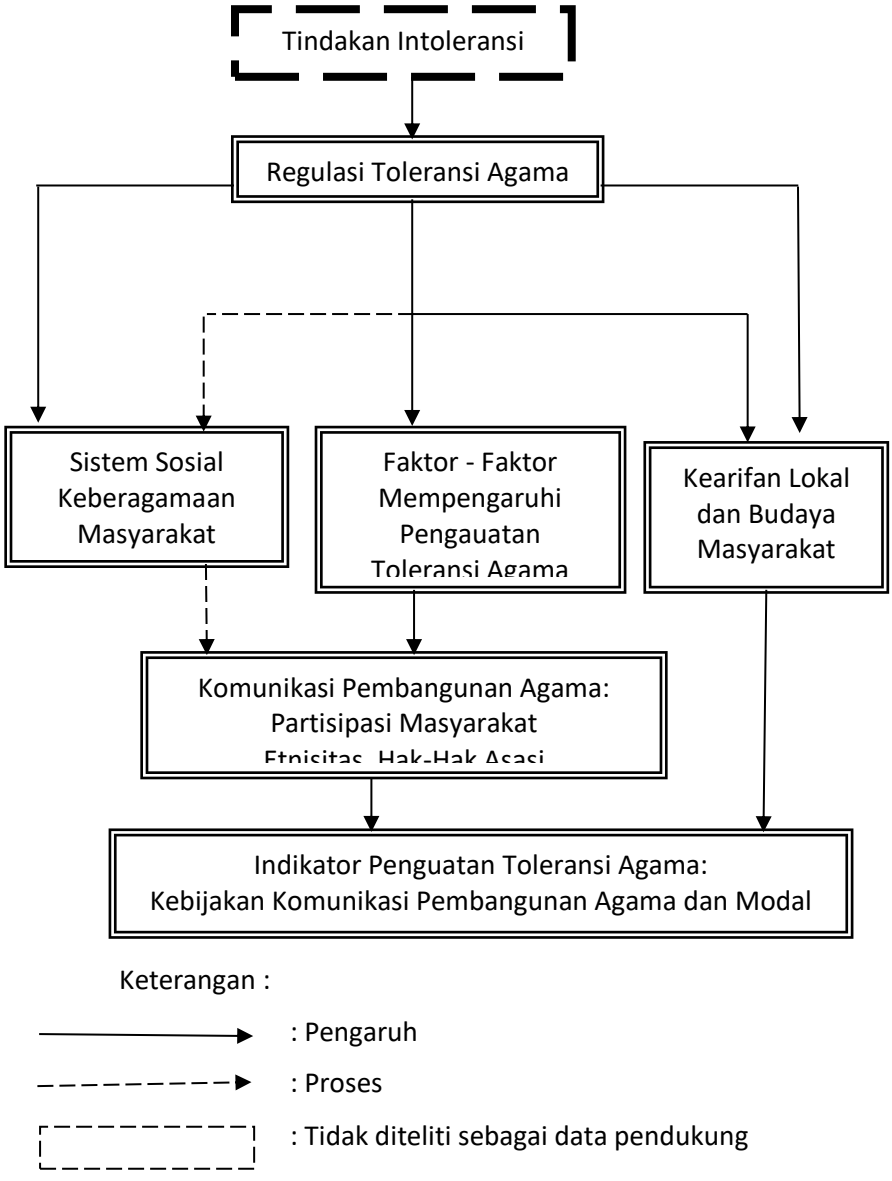

Gambar 3.2. Kerangka Pemikiran Penelitian

penguatan toleransi agama baik secara srtuktural maupun kultural. Terjadinya depolitisasi struktur lembaga resmi negara oleh suatu kekuatan kelompok masyarakat dalam menggunakan bahasa agama. Perlunya redepenisi terhadap bentuk komunikasi pembangunan agama dalam konteks lokal yang memiliki muatan pembangunan agama yang berkelanjutan, dengan optimalisasi seluruh potensi yang ada dalam sistem kehidupan sosial masyarakat.

Salah satu cara yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam mengoptimalisasikan seluruh potensi yang ada baik secara struktural maupun kultural. Dalam hal ini harus ada kesamaan visi dan misi dalam pembangunan di sektor keagamaan antara aktor-aktor yang terlibat dalam proses tersebut. Pemerintah Kota Bogor dengan seluruh jajaran yang terlibat dalam proses pembangunan agama, harus segera menyamakan persepsi tentang perlunya mendorong reformasi biokrasi dalam konteks pembangunan agama sebagai suatu agenda publik yang penting, terlebih lagi terkait dengan kebijakan pengkomunikasian konten regulasi toleransi agama, sebagai salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam mewujudkan suatu tatanan yang harmoni dalam kehidupan keberagamaan.

Abrar (2008: 13) Menjelaskan, proses masuknya isu komunikasi menjadi sebuah agenda dan kebijakan komunikasi pada hakikatnya merupakan suatu proses yang berdosis politik sangat tinggi. Artinya proses ini sangat dipengaruhi oleh sistem politik yang ada pada suatu wilayah pemerintahan, bagaimana konten regulasi yang terkait dengan pembangunan toleransi agama dapat terdistribusikan dengan baik tanpa ada suatu tekanan politik, hal ini dikarenakan persoalan agama merupakan kebutuhan dasar yang dilindungi oleh pemerintah secara individu, apalagi memiliki keterkaitan hak-hak dasar sebagai warga negara.

Hubungan antar umat beragama, memang tidak hanya cukup dengan adanya regulasi yang mengatur aspek interaksi

manusia yang berbeda keyakinan. Peraturan itu hanyalah alat yang dijadikan oleh negara untk menciptakan suasana yang kondusif, bukan sebaliknya. Akan tetapi terkadang ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah, malah menimbulkan persoalan pada masyarakat, bahkan sampai memunculkan konflik yang menjurus pada konflik agama.

Perlua adanya sistem yang kuat untuk merangkul seluruh elemen-elemen yang terdapat dalam sistem sosial masyarakat,terhadap kebijakan regulasi yang dibuat oleh pemerintah, atas dasar kebutuhan masyarakat. Terkait dengan pembangunan agama. Tolkhah (2001: 1) Menyadari tentang besarnya potensi konflik yang bercorak keagamaan tersebut, maka para pendiri bangsa ini meletakkan dasar negara Indoensia secara tepat, yakni Pancasila. Dapat dikatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara subtansial sangat masuk akal untuk dapat mengayomi kemajemukan kelompok agama masyarakat di Indonesia. Di satu sisi dapat dikatakan bahwa dasar negara Indonesia tersebut mencerminkan adanya penghargaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai ukhrowi yang dianut semua pemeluk agama yang hidup di Indonesia, meskipun Indonesia bukan negara agama. Di sisi lain dasar negara Indonesia juga sangat menghargai nilai-nilai duniawi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sosial meskipun negara ini bukan negara sekuler. Namun demikian, alam realita ketegangan dan konflik antar umat beragama tetap saja terjadi, terutama karena adanya benturan kepentingan antar kelompok sosial satu sama lain.

Komunikasi pembangunan agama di Kota Yogyakarta, juga tidak berjalan sama sekali. Terkait dengan Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006, Nomor: 8 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama,

dan Pendirian Rumah Ibadat. Peneliti menemukan Pemerintah Kota saat ini tidak memahami isi konten dari regulasi tersebut. Salah satunya adalah bagaimana peran-peran yang ada dalam sistem masyarakat dalam pembangunan agama tidak teroptimalkan. Hal ini dikarenakan, adanya pemasungan secara sistematis yang dilakukan oleh suatu kekuatan kelompok dengan mengatasnamakan agama, sebagai legitimasi pembenaran. Kekuatan kelompok masyarakat yang "tercerahkan" telah banyak mengambil alih tugas dan fungsi negara dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengkomunikasikan secara sistematis tentang pembangunan agama terkait dengan penguatan toleransi agama baik secara kultural maupun secara struktural.

Secara sistematis kebijakan publik yang terkait dengan komunikasi pembangunan agama dalam konteks penelitian ini. Regulasi yang di buat oleh pemerintah pusat, ketika sampai pada persoalan pelaksanaan tekhnis untuk tingkat Pemerintah Kota, menurut peneliti masih dijumpai beberapa hal yang kurang sejalan dengan semangat otonomi daerah dalam melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Ada beberapa persoalan secara tekhnis terkait dengan regulasi yang telah diuraikan sebelumnya, diantaranya; Pertama. Begitu besarnya peranan pemerintah terutama di dalam pembatasan pendirian rumah ibadah tentunya mengundang pertanyaan terutama jika dikaitkan dengan kebebasan setiap warga negara dalam menjalankan ajaran agama, dimana kondisi tersebut masuk dalam ranah hak asasi yang tidak bisa dihilangkan *non-derogable rights,* seperti termaktub di dalam pasal 28 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peran pemerintah di tingkat Pemerintahan Kota, dalam menerapkan regulasi tersebut, menurut peneliti dapat menimbulkan semangat mayoritas yang memberi penekanan terhadap kelompok minoritas. Sehingga sistem yang pada sebelumnya mempunyai fungsi-fungsi yang sama, dengan pemerintah akhirnya didepolitisasi, dengan mengatas namakan menjaga stabilitas

pembangunan agama, yang akan dilakukan harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas, terukur, sehingga mempermudah untuk melakukan sistem monitoring dan evaluasi terkait dengan kebijakan pembangunan agama pada pemerintahan selanjutnya.

Membangun sinergitas komunikasi secara lintas sektoral dengan institusi Kementerian Agama Kota Yogyakarta, yang selama ini tidak terbangun dengan baik, apalagi dalam institusi Kementerian Agama, ada suatu jabatan fungsional yang selalu berhubungan dengan umat beragama, yaitu para penyuluh agama. Selama ini peran penyuluh agama kurang dilibatkan dalam sistem komunikasi pembangunan agama. Berikut kutipan wawancara salah seorang pejabat fungsional di Kota Yogyakarta. (SP. 48 tahun) :

..... Selama ini kami tidak pernah terlibat komunikasi dengan pihak Pemerintah Kota Yogyakarta, terkait dengan pembangunan agama pada aspek toleransi agama. Begitu juga dengan penguatan personil FKUB yang tugas mereka secara kelembagaan adalah menjaga dan menciptakan kondisi kehidupan keberagamaan yang haromonis. Pengurus FKUB Kota Yogyakarta merupakan sebahagian besar pegawai pada institusi Kementerian Agama Kota maupun wilayah. Kalaupun ada undangan dari pihak Pemerintah Kota, itupun hanya terkait dengan pengamanan perayaan natal, suksesi PILPERS. Pembahasan itu hanya sebatas untuk hari itu saja. Sedangkan menyangkut keberlanjutan dari apa yang dibahas tidak pernah dibicarakan. Perlu kita ketahui pada dasarnya masyarakat Kota Yogyakarta ini, peluang konfliknya cukup tinggi, apalagi masyarakat Kota Yogyakarta juga memiliki konflik yang bernuansa agama, yang sampai saat ini belum terselesaikan. Seperti penyerangan jamaah Ahmadiyah Kelurahan Baciro, adanya spanduk-spanduk yang bertuliskan anti Syiah, yang dibuat oleh kelompok yang mengatas namakan agama tertentu, ketika suasana natalan, adanya pemuka agama yang mengharamkan untuk berjabat tangan kepada tetangga non muslim, walaupun itu tidak diucapkan ..... (Wawancara tgl 10Maret 2015. Jam 08.30 Wib)

Srampickal, S,J,J., 2006. *Communication Research Trends In This Issue Development and Participatory Communication.* Volume 25 (2006) No.2. Pontificia Universitia Gregoriana Rome. Italy

Stout ,A, D., 2006. *Encyclopedia of Relegion, Communication, and Media*. New Yor. Routledge.

Subejo., 2006. *Penyuluhan Pertanian Indonesia Di Tengan Isu Desentralisasi, Privatisasi dan Demokratisasi. Jurnal Penyuluhan Pertanian*. Volume 2. N0. 2. hal. 69-71

Subkhan., I, 2011. *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme Di Yogya*. Cetakan. Ke 5. Kanisius. Yogyakarta.

Sugiyono., 2013. *Statistika Untuk Penelitian*. Cetakan ke 22. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono., 2014. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Cetakan ke 2. Alfabeta. Bandung.

Suhartao (c), E,. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama

Suharto (a), E., 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta. Bandung

Suharto (b), E., 2006. "*Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Pusaran Desentralisasi dan Good Governance*", makalah yang disampaikan pada Semiloka Kompetensi Sumberdaya Manusia Kesejahteraan Sosial di Era Desentralisasi dan Good Governance, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarmasin 21 Maret 2006

Sujito, A., 2016. *Ruang Interaksi Di Yogya Menipis*, Tribun Jogya, 2 Januari 2016, hal.1

Suparlan, P., 1980. Kata Pengantar. Dalam. Roland,R (Ed) *Agama Dalam Analisa Dan Interpertasi sosiologis*. Edisi Terjemahan. Rajawali. Jakarta

Suprapto., 2013. *Revitalisasi Nilai-nilai Kearifan Lokal Bagi Upaya Resolusi Konflik*. Volume 21. N0 1. Mei. 2013

Suwarsih., dkk, 1987. "*Pandangan Hidup Orang Sunda" Seperti Tercermin Dalam Tradisi Lisan dan Sastra Sunda*. Bagian Proyek Peneltian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi), Ditjen Kebudayaan DEPDIKBUD. Bandung

Suyuti, H,. 2015. *Peringatan HUT ke 70 Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 2015. Sambutan Walikota Yogyakarta Pada Malam Tirakatan*. Yogyakarta

Syam, N., 2013. *Tantangan Multikulturalisme di Indonesia*. Cetakan. Ke V. Kanisius. Yogyakrta

Syamsiatun,S., dkk, 2014. *Dinamika Persepsi Nilai Luhur Kejawaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Konteks Hubungan Antar Iman*. Mendukung Keistimewaan yogyakarta Melalui Prespektif Keilmuan Multidisiplin Guna Membangun Kemandirian Bangsa. Sekolah Pascasraja universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

T. Craig dan L. Muller H., 2007. *Thoerizing Communication Reading Across Traditions*. Thousand Oaks. California. Sage Publications

Taher, T., 1997. *Aspiring for the Middle Path: Religious Harmony in Indonesia*.Jakarta. CENSIS.

Tarib, M., 2015. Seni Budaya.http://kayabudaya.blogsp (diakses pada tanggal 2 November 2015)

Taufik, T, M., 2012. *Etika Komunikasi Islam*. Pustaka Setia. Bandung

Tempo,2015,http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/06/078716690/di-konferensi-internasional-bima-arya-pamer-toleransi-agama Di Konferensi Internasional, Bima Arya Pamer Toleransi Agama (diakses pada tanggal 21 November 2015)

The Wahid Institue., 2011. *Lampu Merah Kebebasan Beragama. Laporan Kebebasan Beragama Di Indonesia.* Jakarta,The Wahid Institue

The Wahid Institue., 2012. *Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama Dan Intolerasni 2012 Di Indonesia.* Jakarta,The Wahid Institue

The Wahid Institue., 2013. *Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Dan Intolerasni 2013 Di Indonesia.* Jakarta,The Wahid Institue

The Wahid Institue., 2014. *Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Dan Intolerasni 2014 "Utang Warisan Pemerintahan Baru.* Jakarta,The Wahid Institue

Tholkhah,I., 2001. *Mewaspadai dan Mencegah Konflik Antar Umat Beragama*, Jakarta, Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama.

Tolkhah,I., dan Barizi, A,. 2003. *Agama dan Institusi Sosial (Geliat Mencari Otentisitas Iman Dalam Pelembagaan Agama,* Jurnal Harmoni. Volume II,No.7, Juli-September 2003. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, hal. 66-82

Tracy, D., 1987. *Plurality and Ambiguity, Hermeneutic, Religion, Hope*, Chicago: University of Chicago Press.

Turner, S, B., 2013. *Sosiologi Agama*. Terjemahan. Daryatno. Cet.I. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Undang-Undang Keistimewaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakrata

Vermonte, P,J dan Basuki, T., 2012. *Masalah Intoleransi, Toleransi, dan Kebebasan Beragama. Jurnal, Maarif. Arus Pemikiran Islam Dan Sosial*, Vol.7, N0.1, Tahun 2012, hal. 21-42

Weber, M., 1993. *The Sociology of Relegion*. Fourth Edition. Beacon Press. Boston

Wher, H., 1980. *A Dictionary of Modern Written Arabic* .MacDonald & Evans Ltd.,London.

White,S.A. Nair, K.S. & J. Ascroft (Eds) 1994. *The Concept of Participation: Transforming Rethoric to Reality. Participatory Communication: Working for Change and Development.* New Delhi. India. Sage Publication.,

Wibisono,S., 2012. *Orientasi Kebergamaan, Modal Sosial Dan Prasangka Terhadap Kelompok Agama Lain Pada*

Mahasiswa Muslim. *Jurnal Insan*, Volume 14. N0.03. 2012. 136-148

Wibisono. M,Y., 2013. *Keberagamaan Masyaratkat Pesisir: Studi Perilaku Keagamaan Masyarakat Pesisir Patimban Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang Jawa Barat*. Disertasi. Bandung : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Bandung.

Wilkins. K. G,. (Ed), 2000. *Redeveloping Communication for Socal Change : Theory, Practice, and Power.* Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.

www,*beritasatu-nasional* (2012)-49745.pdf (diakses 22 Februari 2014)

Yin. K. R., 2015, *Studi Kasus Desain dan Metode*, Cetakan ke 14, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Zainudin. M., 2005, *Pluralisme dan Dialog Antar Umat Beragama*. *Jurnal Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 5 No. 1, Maret 2005, hlm. 37-55

Zungeler,J., 1991. *Acommodation in native-nonnative interactions: Going beyond the "what" to the "why" in second language research*. In H. Gilles, J. Coupland, & N. Coupland. *Contexts of acommodation: Develpments in applied sociolinguistics*. University Perss. Cambridge

TENTANG PENULIS

Hasan Sazali adalah dosen S-1 ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, juga menjad pengajar pada program Pascasarjana Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan komunikasi, S-2 mengampuh mata kuliah Komunikasi Pembangunan Masyarakat Islam, pada jenjang S-3 mengampuh mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi. Saat ini juga di percaya sebagai Ketua Prodi Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera utara. . Menikah dengan Dr. Desvi Yanti Mukhtar,M.Si Psikolog, dan kini telah dikarunia satu orang putra Muhammad Shafwan Azzam Sazali

Selepas nyantri di Pondok Pesantren Ulumul Quran Stabat, kemudian melanjutkan studi S-1 Pada Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, S-2 di IAIN Sumatera Utara, dalam bidang Dakwah dan Pegembangan Masyarakat Islam, Kemudian berubah menjadi Komunikasi Islam, serta S-3 di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam bidang Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan.

Aktif menulis seta mengikuti konferensi baik nasional maupun internasional, ada beberapa jurnal yang telah diterbitkan baik dalam maupun luar negeri di antaranya : Kontestasi Penyuluh Agama Dalam Agenda Pembangunan Nasional (2016) Revitalisasi Ruang Publik Analisis Kontestasi Penguatan Toleransi Agama Studi kota Yogyakarta (2016) Information Accsess Capability of goat farmers in Purworejo in Indonesia (2016) Komunikasi Pembangunan Agama Dalam Membangun Toleransi Agama Analisis sistem dan Aktor (2016)

Penguatan Toleransi Agama ”Analisis Komunikasi Pembangunan Agama (Studi Pemerintahan Kota Bogor) (2016) Contestation In Development Communication Design of Religion: Efforts of Strengthening Religious Tolerance Case Study of Yogyakarta Goverment (2017) Communication Design of Religious Development. An Effort to Develop Religious Tolerance Policy Case Study in Yogyakarta City (2018) Woman in Anomaly Communication of Religious Develeopmen in Indonesia: Study in Yogyakarta(2018) Sistem Penguatan Peran Keluarga Berbasis Agama da Kearifan Lokal Dalam Mengantisipasi Perilaku Inses Keluarga Inti Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Tanjung Tiram(2018) The Leadership of Head of the Medan City Police Departement in Strengthening Community System (2018) Strengthening The Satet Institutional Communication Development System In Radicalism Management in Indoensia (2019) Meta Analysis of Woman Politician Portrait in Mass Media Frames (2019) Local Cultural Based Politicial Communication in Medan City (2019)